

POLICY ASSESSMENT
Juni 2005

MEMBANGKITKAN INVESTASI DI INDONESIA

Awan Wibowo Laksono Poesoro
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute

I. Pendahuluan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden (Wapres) Mohammad Jusuf Kalla (Kalla) dilantik di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pagi hari tanggal 20 Oktober 2004. Pada malam harinya, Presiden dan Wapres mengumumkan orang-orang kepercayaan yang dipilih untuk memperkuat kabinet mereka, yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.¹ Segera setelah itu, pasangan pemimpin tersebut, beserta kabinet yang mereka bentuk, mesti berhadapan dengan segudang permasalahan berat, sebagian di antaranya merupakan warisan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Sejak dilanda krisis multidimensi -- yang diawali dengan terjangkitnya ekonomi Indonesia oleh krisis moneter yang melanda beberapa perekonomian Asia Timur dan Tenggara -- pada pertengahan 1997, negara kita belum benar-benar sembuh dari permasalahan terkait di bidang moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun sosial. Pada era pascarezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto -- yang berkuasa di republik ini selama 32 tahun -- yang dikenal sebagai era Reformasi, kita telah menyaksikan tiga

¹ Terdapat 36 nama yang mengisi kabinet ini: 3 nama mengisi posisi menteri koordinator, 18 nama mengisi jabatan menteri yang memimpin departemen, 13 nama menjabat menteri negara non-departemen, dan 2 nama memegang posisi pejabat setingkat menteri negara.

pemerintahan silih berganti memegang tampuk kekuasaan.² Ketiganya belum berhasil membawa perbaikan-perbaikan signifikan terhadap berbagai permasalahan yang ada.

Tulisan ini membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintahan SBY-Kalla di bidang investasi, yang sebagian di antaranya merupakan peninggalan pendahulu-pendahulunya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai berbagai permasalahan di bidang investasi yang dihadapi pemerintahan SBY-Kalla, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, perhatian pada aturan yang menjadi acuan pembangunan bidang investasi pemerintahan SBY-Kalla perlu diberikan. Oleh karena itu, Bagian II dari tulisan ini akan membahas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang investasi.

Kedua, perlu diamati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan SBY-Kalla dalam hubungannya dengan Agenda 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu dan RPJMN. Dalam kerangka ini, Bagian III akan menguraikan program-program peningkatan investasi pemerintahan baru ini.

Ketiga, agar diperoleh gambaran lengkap mengenai investasi di Indonesia, perlu dilihat apa yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Untuk itu, Bagian IV akan melihat pembangunan ekonomi dan investasi pada era prakrisis ekonomi 1997, yakni pada jaman Orde Baru, di mana banyak permasalahan investasi bermuara. Selanjutnya, pada Bagian V akan dibahas kondisi investasi pada era pascakrisis ekonomi di Indonesia. Di sini, akan diuraikan masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang ada.

Kemudian, Bab VI dari tulisan ini akan memberikan saran-saran yang mungkin berguna dalam memecahkan permasalahan di bidang investasi di Indonesia. Selanjutnya Bab VII akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tentang investasi di Indonesia pada era pemerintahan SBY-Kalla. Sebagai tambahan, akan diberikan sebuah contoh kasus investasi di Indonesia dalam bentuk Box. Pemberian contoh ini perlu untuk menggarisbawahi betapa pentingnya permasalahan dan tantangan investasi yang dihadapi sektor-sektor ekonomi, serta betapa perbaikan investasi

² Pemerintahan Baharuddin Jusuf Habibie, Pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

di sektor-sektor tersebut akan memberikan kontribusi signifikan terhadap usaha-usaha pemulihan perekonomian yang terpuruk didera krisis beberapa tahun belakangan ini.

II. Aturan-aturan Acuan Kebijakan Investasi

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004 SPPN) mensyaratkan bahwa paling lambat tiga bulan setelah Presiden dan Wapres terpilih dilantik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sudah dapat ditetapkan melalui sebuah Perpres.³ Selanjutnya, Pasal 14 dari UU yang sama menentukan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dibebankan tugas untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, dan kerangka ekonomi makro secara menyeluruh (termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal pemerintah) ke dalam Rancangan Awal RPJMN.

Merujuk pada UU No. 25/2004 SPPN, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (PP No. 20/2004 RKP), dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat diharuskan membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan -- yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) -- yang akan dijalankan oleh elemen-elemen penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan mengikutsertakan peran masyarakat umum.

Menurut Pasal 16 UU No. 25/2004 SPPN, Rancangan Awal RPJMN 2004-2009 disebarkan ke seluruh Kementerian/Lembaga dan dipakai sebagai acuan pembuatan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Di level daerah, RPJMN diserahkan ke semua Kepala Daerah sebagai rujukan untuk pembuatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) -- di mana dalam hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mempunyai tugas menyusun Rancangan Awal RPJMD sebagai penerjemahan visi, misi,

³ RPJMN yang pertama diluncurkan melalui Perpres No. 7 tentang RPJMN 2004-2009.

dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya, RPJMN juga digunakan oleh Kepala Daerah sebagai rujukan untuk pembuatan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan publik yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembuatannya, tidak hanya mengandalkan unsur-unsur pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*decision makers*). RPJMN 2004-2009, sebagai sebuah produk kebijakan publik pemerintahan SBY-Kalla, juga bersifat partisipatif dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Hal ini dapat jelas dilihat dari dilibatkannya kalangan dunia usaha (*business community*) dan lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organizations*), yang merupakan bagian dari masyarakat madani (*civil society*), baik di level pusat maupun daerah dalam proses pembuatan RPJM melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan tercapainya saling pengertian dan terbentuknya komitmen antara *decision makers*, pelaksana kebijakan (*executors*) -- baik pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I, maupun pemerintah tingkat II -- dan *civil society* sebagai *partner*.

Dalam RJP MN 2004-2009, pemerintahan SBY-Kalla memuat Visi Pembangunan Nasional dari pemerintahan mereka, yaitu:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal dan bagian integral dari RJP MN 2004-2009, pemerintahan SBY-Kalla menyiapkan Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu, yang berisikan prioritas-prioritas, program-program, dan strategi-strategi pembangunan

pemerintahan yang baru untuk 100 hari pertama masa kekuasaannya.⁴ Sebagaimana halnya Agenda 100 Hari Pertama, RJPMN 2004-2009 pemerintahan SBY-Kalla juga berisi tiga agenda kegiatan -- yang juga merupakan tiga Misi Pembangunan Nasional 2004-2009 dan disusun berdasarkan Visi Pembangunan Nasional 2004-2009 tersebut di atas.

Agenda 100 Hari Pertama pemerintahan SBY-Kalla ini terdiri dari tiga bagian: agenda satu, mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; agenda dua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; dan agenda ketiga, mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Agenda ketiga yang ditujukan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera ini dibagi lagi menjadi tiga sub-agenda: pertama, perbaikan iklim investasi; kedua, menjaga stabilitas ekonomi makro; dan terakhir, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Karena tulisan ini memfokuskan pada permasalahan investasi yang dihadapi oleh pemerintahan SBY-Kalla, maka sebagai aturan-aturan rujukan akan ditekankan pada sub-agenda perbaikan iklim investasi, baik dari Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu maupun dari RJPMN 2004-2009.

III. Program-program Investasi Kabinet Indonesia Bersatu

Untuk mewujudkan sub-agenda ketiga (tercapainya perbaikan iklim investasi di Indonesia) dari Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu maupun dari RPJMN 2004-2009, pemerintahan SBY-Kalla menerapkan beberapa program. Program-program tersebut diterapkan sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan beberapa prioritas pembangunan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun kelima masa tugasnya.

Dari beberapa prioritas yang ada, yang menarik dan penting untuk dicermati dalam mempelajari iklim investasi di Indonesia adalah: satu, prioritas untuk memperbaiki iklim investasi dan kepastian usaha; dua, prioritas untuk menciptakan lapangan kerja; dan

⁴ Agenda 100 Hari Pertama sebuah pemerintahan ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Presiden yang berasal dari Partai Demokrat ini adalah Presiden yang berhasil membawa Amerika Serikat (AS) keluar dari Jaman Resesi Ekonomi Hebat Dekade 30-an (*the Great Depression of the 1930s*) dan yang memimpin negaranya ketika Perang Dunia II (*the World War II*) pecah.

tiga, prioritas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui partisipasi sektor swasta.

Untuk mencapai prioritas perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha, program-program pemerintahan SBY-Kalla antara lain: peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak; peninjauan kembali pajak daerah yang menghambat investasi; penyediaan insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha; peningkatan daya saing industri; peningkatan fasilitas perdagangan dan pengamanan industri manufaktur; deregulasi kebijakan ekspor impor untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan peningkatan transparansi; peningkatan kepastian berusaha di sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk peningkatan produksi dan distribusi migas, dan peningkatan investasi pertambangan; dan optimalisasi industri kehutanan.

Untuk mewujudkan prioritas penciptaan lapangan kerja, program-program pemerintahan SBY-Kalla, yaitu: perbaikan PP dan Keputusan Menteri (Kepmen) dalam rangka menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel; dan penyempurnaan kegiatan pendukung pasar tenaga kerja dalam rangka mempertemukan pengguna dan pencari kerja.

Untuk menggapai prioritas percepatan pembangunan infrastruktur melalui partisipasi sektor swasta, program-program pemerintah adalah: peletakkan dasar-dasar perubahan kebijakan dalam rangka menggalakan kerja sama kerja sama pemerintah dengan sektor swasta dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur melalui revitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI); perluasan sarana perumahan rakyat dan transportasi umum; peningkatan iklim investasi di bidang jasa transportasi; dan pementapan efektifitas kelembagaan di bidang transportasi.

IV. Investasi di Indonesia Era Prakrisis

Ketika krisis moneter melanda perekonomian di tahun 1997, meskipun Indonesia telah merdeka selama 52 tahun, negara ini baru mengalami pembangunan yang cukup signifikan sekitar 30 tahun, yaitu selama era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selama pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno, proses pembangunan dan kegiatan investasi agak terbengkalai sehingga kondisi perekonomian negara memburuk.

Pada tahun 1965 -- tahun di mana Soekarno mulai kehilangan cengkraman kekuasaannya, akibat kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) yang gagal -- *budget deficit* meningkat sampai level 6,6 persen⁵ dari *Gross Domestic Product* (GDP) dan inflasi meroket ke level 594 persen⁶. Sementara itu, perekonomian hanya mampu tumbuh 1,1 persen⁷, dan penduduk yang hidup dalam kemiskinan berjumlah sekitar 70 persen dari total populasi yang sebesar 105,414 juta orang⁸.

Era pembangunan dan investasi dimulai ketika Soeharto secara formal menjalankan tugasnya pada Maret 1968. Pemerintahan Orde Baru, melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sukses membangkitkan perekonomian negeri kita yang terpuruk. Masalah-masalah ekonomi yang diwariskan pemerintahan Orde Lama, seperti tingkat inflasi yang sangat tinggi, *budget deficit*, kemiskinan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan hutang luar negeri yang sangat besar, segera diberikan perhatian. Bila selama era Soekarno Indonesia secara politis dekat dengan Blok Timur -- oleh karenanya menutup pintu terhadap kerjasama Barat -- di era Soeharto, Indonesia terdesak oleh keadaan untuk membuka kembali hubungannya dengan negara-negara Barat serta berbagai organisasi multilateral -- seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *the International Monetary Fund* (IMF) -- untuk mendapatkan bantuan untuk merestrukturisasi perekonomiannya yang lumpuh, terutama dalam memecahkan masalah hutang luar negeri.

Dengan bantuan Dunia Barat, hutang luar negeri sebesar 2,4 milyar dollar⁹ -- yang utamanya digunakan untuk membangun angkatan bersenjata (rezim Soekarno membelanjakan rata-rata 30,6 persen¹⁰ dari total pengeluarannya sepanjang 1951-1965 untuk keperluan militer, menjadikan angkatan bersenjata kita yang terkuat di belahan bumi selatan dalam periode tersebut) dan mengimpor produk-produk pertanian, karena ketidakmampuan Indonesia untuk memenuhi permintaan dalam negerinya walaupun memiliki potensi pertanian yang besar -- berhasil dipecahkan melalui skema *rescheduling*.

⁵ Sumber statistik: data World Bank (Woo, Glasburner, and Nasution 25).

⁶ Sumber statistik: data World Bank (Woo, Glasburner, and Nasution 167).

⁷ Sumber statistik: data World Bank (Woo, Glasburner, and Nasution 167).

⁸ Sumber statistik: Statistical Pocketbook of Indonesia 1974/1975.

⁹ Sumber statistik: data World Bank (Woo, Glasburner, and Nasution 46).

¹⁰ Hasil perhitungan penulis dengan menggunakan data World Bank (Woo, Glasburner, and Nasution 26).

Pemerintahan Soeharto, tak seperti pendahulunya, mengkonsentrasikan perhatiannya pada pembangunan ekonomi dan berjuang untuk mengejar ketertinggalan Indonesia. Pada 1974, tahun di mana Repelita pertama berakhir, Indonesia berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, rata-rata per tahun sebesar 8.6 persen¹¹ selama periode 1968-1974. Kecepatan pertumbuhan ekonomi ini cukup mengagumkan bila dibandingkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 2 persen selama periode 1960-1965. Tingkat inflasi, yang mencapai puncaknya pada tingkat 635.4 persen pada 1966, dapat dikurangi sampai tingkat rata-rata per tahun sebesar 28 persen¹² sepanjang 7 tahun pertama dari era rezim Orde Baru. Pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin dapat dikurangi menjadi 40 persen dari total populasi, di mana 82 persen di antaranya tinggal di pedesaan.¹³

Pemerintahan Soeharto berusaha memodernisasi Indonesia, yang tak banyak berkembang sejak ditinggalkan Belanda. Untuk itu, pemerintahan ini mengundang negara-negara Barat untuk berinvestasi. Satu kebijakan yang ditempuh adalah meluncurkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967 PMA), yang membiarkan investor asing menggunakan sumber-sumber daya dan teknologi dari luar Indonesia, memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk menyewa tenaga kerja asing, dan mengizinkan investor asing untuk mentransfer keuntungan ke negara asal mereka setiap saat. Kebijakan ini terbukti cukup manjur -- dilihat dari meningkatnya nilai investasi asing yang disetujui, dari 192,39 juta pada 1967 ke 331,60 juta dollar AS pada 1968, peningkatan sebesar 72 persen dalam waktu setahun.¹⁴ Pada tahun terakhir Repelita pertama, 1974, nilai investasi asing yang disetujui sebesar 1,052 milyar dollar AS. Selama periode *recovery* 1967-1974, nilai kumulatif investasi asing yang disetujui mencapai *level* yang cukup tinggi sebesar 3,945 milyar dollar, lebih dari 20 kali lipat *level* investasi asing yang disetujui pada 1967.

¹¹ Seluruh tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun adalah hasil perhitungan penulis dengan menggunakan data-data Statistical Pocketbok of Indonesia (berbagai tahun), Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun), dan data World Bank (Woo, Glasburner, and Nasution 167).

¹² Seluruh tingkat inflasi rata-rata per tahun adalah hasil perhitungan penulis dengan menggunakan data-data Statistical Pocketbok of Indonesia (berbagai tahun), Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun), dan data World Bank (Woo, Glasburner, and Nasution 167).

¹³ Sumber data tentang kemiskinan: Statistical Yearbook of Indonesia 1999.

¹⁴ Sumber data tentang investasi asing yang disetujui: Statistical Pocketbok of Indonesia (berbagai tahun), Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

Jika selama era Orde Lama Indonesia hanya mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 3,2 persen per tahun, Indonesia di jaman Orde Baru mampu menggapai 6,7 persen selama periode 1968-1996. Sebagai perbandingan terhadap nilai GDP Indonesia pada 1969 yang sebesar 7,097 milyar dollar, Indonesia pada 1996 memiliki GDP senilai 227,37 milyar dollar.¹⁵ Jika penduduk Indonesia hanya menerima pendapatan per kapita sebesar 20,880 rupiah (54,52 dollar) pada 1969, dia mendapatkan 2,351,281 rupiah (1.000 dollar) pada 1996.¹⁶

Ini berarti pembangunan ekonomi menghasilkan pertumbuhan lebih dari 18 kali lipat pada pendapatan per kapita, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,1 persen per tahun selama periode 1970-1996.¹⁷ Tingkat pertumbuhan ini cukup tinggi bila dibandingkan tingkat pertumbuhan rata-rata negatif sebesar 0,6 persen selama 1960-1965. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menurunkan prosentasi penduduk miskin dari 40 persen pada 1976 ke 11,3 persen pada 1996.

Prestasi-prestasi pembangunan pemerintahan Orde Baru tersebut ternyata tak menunjukkan struktur perekonomian Indonesia yang sesungguhnya. Kegiatan pembangunan selama 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru ternyata menitikberatkan pada usaha-usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi semata. Proses pembangunan yang dijalankan tak disertai usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara utuh dan tak dibarengi usaha-usaha untuk membangun dan memperkuat institusi-institusi, baik publik maupun swasta, yang memiliki peran penting dalam melancarkan berjalannya sistem perekonomian yang baik. Sebagai akibatnya, ketika krisis moneter menginfeksi perekonomian pada 1997, krisis tersebut dengan cepat berkembang menjadi sebuah krisis multidimensi, yang meliputi krisis-krisis di bidang ekonomi, politik, sosial, bahkan hukum.

Pencapaian ekonomi Orde Baru langsung berbalik arah. Pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 7 persen per tahun pada tahun 1990an tak dapat dipertahankan, dengan jatuhnya pertumbuhan ke tingkat 4,7 persen pada 1997. Kuatnya krisis bahkan memaksa

¹⁵ Sumber data tentang GDP: Statistical Pocketbok of Indonesia (berbagai tahun), Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

¹⁶ Sumber data tentang pendapatan per kapita: Statistical Pocketbok of Indonesia (berbagai tahun), Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

¹⁷ Semua tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata per tahun adalah hasil perhitungan penulis dengan menggunakan data-data Statistical Pocketbok of Indonesia (berbagai tahun), Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

perekonomian berkontraksi sebesar 13,2 persen pada 1998. Krisis multidimensi ini juga menyebabkan terjadinya *capital outflows* yang besar dari perekonomian, karena para investor tidak yakin atas masa depan kegiatan investasi mereka di Indonesia.

Sebelum meletusnya krisis moneter, Indonesia berhasil mempertahankan *surplus balance of payments*-nya, rata-rata per tahun sebesar 2,574 milyar dollar AS¹⁸ selama periode 1990-1996. Pada tahun pertama krisis, Indonesia harus menghadapi *balance of payments deficit* sebesar 2,459 dollar AS.¹⁹ *Deficit* yang besar pada *balance of payments* ini disebabkan oleh *outflows* yang sangat besar dari modal swasta di Indonesia. Selama 1990an, Indonesia menikmati *private capital inflows* yang besar dalam bentuk *private foreign direct investments* (FDI) dan *private foreign indirect investments* (termasuk di dalamnya *portfolio investments*). Selama periode 1990-1996, *private* FDI mengalir ke perekonomian Indonesia pada nilai rata-rata 2,715 milyar dollar AS²⁰ per tahun. Sementara, *private foreign indirect investments* masuk pada nilai rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 3,652 milyar dollar AS²¹ per tahun. Pada 1997, 1998, dan 1999, *private indirect investments* jumlah besar ditarik dari perekonomian kita, yaitu sebesar 5,015 milyar, 13,490 milyar, dan 3,722 milyar dollar AS.²² Sedangkan FDI yang ditarik keluar Indonesia adalah sebesar 356 juta dollar pada tahun 1998 dan 2,74 milyar dollar AS pada 1999.²³

V. Investasi di Indonesia Era PascaKrisis

Memasuki tahun ke 8 pascakrisis moneter, Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Orde Baru telah menjadi salah satu korban krisis, dengan digulingkannya rezim tersebut oleh gerakan masyarakat yang dipelopori gerakan mahasiswa. Sejak itu, Indonesia telah mengalami tiga kali pergantian tampuk kekuasaan tertinggi. Pemerintahan-pemerintahan ini berusaha memulihkan perekonomian Indonesia dan berusaha melakukan perubahan-perubahan di bidang sosial, politik, dan hukum ke arah

¹⁸ Hasil perhitungan penulis dengan menggunakan data Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

¹⁹ Sumber data tentang *balance of payments deficits*: Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

²⁰ Hasil perhitungan penulis dengan menggunakan data Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

²¹ Hasil perhitungan penulis dengan menggunakan data Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

²² Sumber data tentang *foreign indirect investments*: Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

²³ Sumber data tentang *foreign direct investments*: Statistical Yearbook of Indonesia (berbagai tahun).

yang lebih baik melalui program-program pembangunan mereka. Beberapa kemajuan dalam bidang-bidang tersebut berhasil dicapai dalam era Reformasi ini, tapi setumpuk masalah tetap menjadi beban dan diwariskan dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lainnya.

Pemerintahan SBY-Kalla pun tak lepas dari permasalahan-permasalahan ini. Ini di antaranya bisa dilihat dari proses pemulihan perekonomian yang tak dibarengi penciptaan lapangan kerja yang cukup. Fenomena yang dikenal sebagai *jobless recovery* ini merupakan tantangan besar yang harus dipecahkan pemerintahan SBY-Kalla. Selama periode pemulihan krisis, *jobless recovery* utamanya terjadi di sektor-sektor perekonomian formal. Sebagai akibatnya, pada 2003 terdapat sekitar 9,5 juta²⁴ penganggur terbuka Indonesia.

Pemerintahan SBY-Kalla menargetkan tingkat pengangguran akan turun dari 9,5 persen pada 2003 ke 6,7 persen pada 2009. Pemerintahan ini juga mengharapkan tingkat kemiskinan dapat diturunkan dari 16,6 persen pada 2004 ke 8,2 persen pada 2009. Untuk mewujudkan target-target itu, pemerintahan SBY-Kalla harus mampu untuk memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi dari 4,2 persen pada 2003 menjadi 7,6 persen pada 2009, sehingga dalam lima tahun masa kekuasaannya pemerintahan ini dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun itu hanya dapat diwujudkan bila rasio investasi terhadap GDP dapat ditingkatkan dari 20,5 persen pada 2004 ke 27,4 persen pada tahun terakhir masa pemerintahan SBY-Kalla, 2009.²⁵

Pencapaian semua target tersebut harus dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa pemulihan ekonomi yang menyeluruh hanya dapat diwujudkan bila terjadi perbaikan-perbaikan pada berbagai sektor ekonomi Indonesia. Kegiatan reformasi ekonomi tak boleh terbatas pada reformasi ekonomi makro saja. Agar dapat dihasilkan hasil yang memuaskan, reformasi juga harus dilakukan pada ekonomi mikro kita. Reformasi pada kedua sektor ekonomi tersebut harus berjalan seiringan dan saling melengkapi. Di sektor ekonomi mikro, pemerintahan SBY-Kalla menghadapi banyak halangan dari pemegang-pemegang kepentingan (*stakeholders*) di sektor ini. Mereka

²⁴ Sumber statistik: RPJMN 2004-2009

²⁵ Sumber data: RPJMN 2004-2009

berusaha agar keuntungan yang selama ini mereka nikmati tak lepas dari tangan mereka. Pemegang kepentingan ini dapat merupakan gabungan dari kalangan bisnis dan oknum-oknum aparat pemerintah. Di sini, keberanian dan ketegasan dari pemerintahan SBY-Kalla diuji dalam menghadapi para pemburu rente (*rent seekers*) tersebut.

Untuk merehabilitasi perekonomian Indonesia, pemerintahan SBY-Kalla harus mampu menarik investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk kembali menanamkan uangnya di perekonomian kita. Para investor potensial harus dapat diyakinkan bahwa berinvestasi di negeri ini akan mendatangkan peluang-peluang keuntungan (*profit opportunities*) yang cukup tinggi. Oleh karenanya, agar iklim investasi di Indonesia menarik bagi para investor untuk kembali melakukan berbagai aktivitas bisnisnya, ada beberapa hal yang patut diperhatikan.

a. Ketidakpastian (*Uncertainty*)

Penting diketahui, kepastian adalah faktor yang sangat diperhitungkan para pengusaha (*businesspeople*) jika akan melakukan kegiatan-kegiatan produktif, terutama untuk jangka waktu yang panjang (*long run*). Bila seorang investor memutuskan untuk berinvestasi di suatu perekonomian, dia sangat berharap untuk dapat memperhitungkan perkiraan keuntungan yang akan diraih sekaligus juga perkiraan biaya-biaya yang akan dipikul sepanjang periode investasinya itu. Oleh karenanya, ketidakpastian (*uncertainty*) adalah salah satu musuh besar yang paling ditakuti para investor. Tingkat ketidakpastian yang tinggi di Indonesia terdeteksi oleh penelitian yang dilakukan *the Japan External Trade Organization* (JETRO) yang membuktikan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah tak begitu menarik dibandingkan dengan iklim investasi di negara-negara tetangganya. Dalam survei yang dilakukan oleh JETRO atas *business community* dan *multinational corporations* (MNCs) tersebut, terkuak bahwa untuk faktor-faktor ketidakjelasan kebijakan pemerintah daerah; ketidakjelasan sistem perpajakan; ketidakjelasan prosedur perdagangan dan bea cukai; serta tingginya upah buruh dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, Indonesia menempati urutan bawah di antara tetangga-tetangganya di Asia (Tabel 1). Dibandingkan dengan Thailand yang mendapatkan jawaban responden sebesar 10 persen untuk ketidakjelasan kebijakan pemerintah daerah, 46 persen untuk ketidakjelasan sistem perpajakan, dan 42 persen

untuk tingginya upah buruh dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, maka jawaban yang diterima Indonesia untuk kategori-kategori yang sama -- yaitu sebesar 68 persen, 72 persen, dan 86 persen -- sungguh memperlihatkan betapa lemahnya daya saing iklim berusaha yang kita miliki dibandingkan tetangga kompetitor kita itu.

Tabel 1
Faktor-faktor Penting Penghambat Investasi

(% jawaban responden)

Negara	ketidakjelasan kebijakan pemerintah daerah	ketidakjelasan sistem perpajakan	Ketidajelasan prosedur perdagangan dan bea cukai	tingginya upah buruh dan rendahnya produktivitas tenaga kerja
Singapura	6	13	21	54
Thailand	10	46	63	42
India	15	56	59	56
Malaysia	17	11	34	52
Filipina	48	21	37	37
Vietnam	61	40	57	30
Indonesia	68	72	68	86

Sumber: JETRO

Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul “*Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth*” juga menempatkan Indonesia pada *ranking* bawah di antara tetangga-tetangga saingan terberatnya dalam hal jangka waktu dan total biaya yang dibutuhkan untuk memulai sebuah kegiatan usaha baru. Studi tersebut menyebutkan bahwa dibutuhkan waktu selama 151 hari dan biaya sebesar 1.163 dollar AS untuk memulai suatu usaha di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Vietnam yang hanya membutuhkan 56 hari dan 136 dollar AS; Filipina yang hanya memerlukan 50 hari dan 202 dollar AS; atau Cina yang hanya memerlukan 41 hari dan 158 dollar AS, memulai suatu usaha di Indonesia menjadi berat di mata para calon investor (Tabel 2).

Tabel 2**Jangka Waktu dan Biaya dalam Memulai Sebuah Kegiatan Usaha Baru**

Negara	Jangka Waktu (hari)	Biaya (dollar AS)
Vietnam	56	136
China	41	158
Thailand	33	160
Filipina	50	202
India	89	265
Malaysia	30	966
Indonesia	151	1.163

Sumber: Laporan Bank Dunia "Doing Business in 2005, Removing Obstacles to Growth"

Berikutnya, faktor penting yang juga menyumbang terhadap tingginya tingkat ketidakpastian dalam berbisnis di Indonesia adalah masalah tak konsistennya kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satu contoh kasusnya adalah industri mebel rotan Indonesia. Pemerintah kita -- dalam hal ini, Departemen Perindustrian -- kembali berencana untuk mengizinkan ekspor rotan asalan (bahan baku rotan), walaupun Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (SK Menperindag) yang menutup keran ekspor rotan asalan tersebut baru berumur kurang lebih satu tahun saja. Bila merunut ke belakang, maka pemerintah telah berulang kali membuka dan menutup keran ekspor rotan asalan sejak pertengahan dekade 80an. Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah atas ekspor rotan asalan ini menciptakan ketidakpastian untuk para pemain di industri mebel rotan Indonesia.

Sebagai negara produsen rotan asalan terbesar di dunia, keputusan pemerintah untuk menutup keran ekspor rotan asalan pada tahun yang lalu telah mengakibatkan banyak industri mebel rotan di negara lain kesulitan pasokan bahan baku, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk merelokasikan pabrik-pabrik mereka ke Indonesia. Dengan rencana pemerintah untuk membatalkan pelarangan ekspor rotan asalan ini, industri mebel rotan di negara-negara pesaing kita akan kembali mendapatkan pasokan bahan baku. Ini sangat tidak menguntungkan untuk kelangsungan hidup industri mebel rotan nasional dan dapat mendorong relokasi industri mebel kita ke negara-negara tetangga. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa dalam memanfaatkan sebaik-baiknya rotan untuk menghasilkan devisa yang sebesar-besarnya, maka rotan sebaiknya diekspor

dalam bentuk barang jadi ketimbang mengekspornya dalam bentuk bahan baku. Masalah *inconsistency* dalam kebijakan-kebijakan ini sangat menghambat efisiensi perekonomian kita.

Karena masalah-masalah tersebut, bahkan bukan hanya para investor baru yang menjadi enggan atau ragu untuk berinvestasi di Indonesia, para investor yang telah menanamkan dananya di negara kita pun sudah mulai banyak yang menutup dan merelokasikan usahanya ke negara-negara tetangga kita. Sebagai contoh, adalah kasus keterlambatan pencairan dana (*financial closing*) yang dilakukan para investor dan bank-bank asing yang mendanai proyek pembangunan *monorail* di Jakarta, karena belum tersedianya jaminan dan kepastian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kelangsungan mega proyek ini (termasuk kepastian atas ketersediaan lahan yang *free and clear*).

Tingginya jangka waktu dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha di Indonesia juga dapat menjadi indikator masih banyaknya pungutan-pungutan, baik resmi maupun liar (pungli), yang dilakukan oknum aparat pemerintah. Sebagai pejabat publik yang seharusnya bertugas melayani masyarakat, mereka malah membuat masyarakat (termasuk juga komunitas bisnis) terbebani dengan pungutan-pungutan yang mereka lakukan. Hal ini menambah ketidakpastian bagi para investor, karena banyak maupun besarnya pungutan yang dilakukan seringkali tak dapat diperkirakan.

Faktor-faktor kestabilan sosial politik dan keamanan juga harus mendapatkan perhatian serius. Tercapainya kestabilan sosial politik dan keamanan akan membuat kondisi negara kita kondusif untuk kegiatan-kegiatan investasi dan usaha-usaha pembangunan ekonomi. Pengalaman era Reformasi menunjukkan bahwa kestabilan sosial politik dan keamanan di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan pada era Orde Baru. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari jauh lebih banyaknya teror bom di Indonesia pada era Reformasi ini. Dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan, dalam periode 1976 hingga 1997 tercatat kira-kira 18 teror bom di Indonesia, sedangkan selama era Reformasi, yang baru berlangsung selama tujuh tahun, telah terjadi kurang lebih 60 buah kali serangan bom di negeri kita (Tabel 3 dan 4).

Tabel 3

Teror Bom di Indonesia Era Prareformasi

Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
11 November 1976	Masjid Nurul Iman, Padang	Komando Jihad (Timzar Zubil)	
20 Maret 1978	Beberapa tempat di Jakarta	Sekelompok pemuda	
14 April 1978	Masjid Istiqlal, Jakarta		
4 Oktober 1984	Kantor BCA Pecenongan, Pertokoan Glodok, dan Gajah Mada	Anggota Gerakan Pemuda Ka'bah, anak organisasi Partai Persatuan Pembangunan, dan menyeret beberapa anggota Petisi 50 sebagai perencanaan pemboman	
24 Desember 1984	Gedung Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang, Jawa Timur		
20 Januari 1985	Candi Borobudur, Jawa Tengah	Mubalig Husein Ali Alhabsy	
16 Maret 1985	Bus Pemudi Ekspres di Banyuwangi, Jawa Timur	Abdulkadir Alhasby	
14 Mei 1986	Wisma Metropolitan, Hotel President, dan Pekan Raya Jakarta	"Brigade AntiImperialis Internasional" di Jepang	
Juni 1986	Serangan roket ke Kedutaan Amerika, Jepang dan Kanada dari Presiden Hotel		
30 September 1991	Hotel Mini, Surabaya		
13 September 1997	Mranggen, Demak, Jawa Tengah	Tiga Pemuda Timor Timur	

Diolah dari berbagai sumber

Tabel 4

Teror Bom di Indonesia Era Pascareformasi

Waktu	Lokasi	Pelaku	Korban
18 Januari 1998	Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta	Agus Priyono, anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dipenjara tujuh bulan lebih karena dianggap mengetahui rencana pemboman	
20 Februari 1998	Kampung Batik Sari, Semarang		
11 Desember 1998	Atrium Plaza Senen, Jakarta	VM Rosalin Handayani dan Yan Pieteron Manusama	
2 Januari 1999	Toserba Ramayana, Sabang, Jakarta Pusat	V.M. Rosalin Handayani dan Yan Pieteron Manusama	
9 Februari 1999	Mal Kelapa Gading, Jakarta		
15 April 1999	Plaza Hayam Wuruk, Jakarta Barat	Anggota Angkatan Mujahidin Islam Nusantara pimpinan Eddy Ranto	
19 April 1999	Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat	Eddy Ranto	
Maret 2000	Depan Hotel Merdeka, Bekasi		Dua orang luka-luka
28 Mei 2000	Gereja Kristen Protestan Indonesia, Medan		
29 Mei 2000	Gereja Katolik, Jalan Pemuda Medan		
1 Juli 2000	Komii Pemilihan Umum, Jakarta		
4 Juli 2000	Kamar kecil Kejaksaan Agung		
11 Juni 2000	Jalan Layang Slipi, Jakarta		
15 Juni 2000	Jembatan Layang Mampang Prapatan, Jakarta		
1 Agustus 2000	Kediaman Duta Besar Filipina, Jakarta	Abdul Jabar bin Ahmad Kandai, Fatur Rahman Al- Ghazi, dan Edi Setiono alias Usman	
27 Agustus 2000	Di depan rumah penduduk di Jalan Bahagia dan di pagar rumah pendeta J. Sitorus, Medan		
13 September 2000	Bursa Efek Jakarta	Teungku Ismuhadi	10 orang tewas dan 15 orang cedera
November 2000	Hotel Omni Batavia, Jakarta		
24 Desember 2000	Beberapa gereja di 10 kota di Indonesia	Abdul Jabar bin Ahmad Kandai, Fatur	19 orang tewas

		Rahman Al- Ghozi, dan Edi Setiono alias Usman	
Januari 2001	Taman Mini Indonesia Indah	Elize M. Tuwahatu	
Maret 2001	Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta		
April 2001	Jalan Percetakan Negara, Jakarta		
10 Mei 2001	Bangunan Yayasan Kesejahteraan Mahasiswa Iskandar Muda, Jakarta		Tiga orang tewas
Juni 2001	Kamar kos di Pancoran, Jakarta		
Juli 2001	Gereja Santa Anna, Pondok Bambu, Jakarta		Puluhan orang cedera
1 Agustus 2001	Plaza Atrium, Senen	Edi Setyono alias Abbas dan Taufik bin Abdul Halim	Enam orang terluka
23 September 2001	Lantai parkir Atrium Plaza, Senen		
31 Desember 2001	Palu, Sulawesi Tengah Asrama haji, Makassar, Sulawesi Selatan		Satu orang meninggal
1 Januari 2002	Depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta	Hasballah	Pelaku tewas
18 Januari 2002	Gardu PLN Cililitan, Jakarta Timur dan tiga gereja di Palu, Sulawesi Tengah		
Maret 2002	Kantor Babinkum, Jakarta		
9 Juni 2002	Lahan parkir Hotel Jayakarta dan Diskotik Eksotis, Kota, Jakarta Barat	Dodi Prayoko	
1 Juli 2002	Mal Graha Cijantung, Jakarta	Lima anggota Gerakan Aceh Merdeka yakni, Ramli. M. Nur, Mudawali, Muhamad Hasan, dan Syahrul	Tujuh orang terluka
23 September 2002	Dekat Kedutaan Amerika		Satu orang tewas
Oktober 2002	Bandung Supermall dan Istana Plaza, Bandung		
12 Oktober 2002	Jalan Legian, Kuta dan dekat kantor konsulat AS, Denpasar. Juga di pintu gerbang masuk kantor Konjen Filipina di Manado, Sulawesi Utara	Mukhlis alias Ali Gufron, Imam Samudra, Ali Imron, Amrozi, dkk	200 orang tewas dan ratusan terluka
5 Desember 2002 (malam Idul Fitri)	Mal Ratu Indah Makassar	Dua belas orang ditangkap polisi	Tiga orang meninggal
Januari 2003	Jalan Jembatan Besi Raya Gang I, Tambora, Jakarta		Dua Polisi cedera
3 Februari 2003	Wisma Bhayangkari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	AKP Anang Sumpena	
1 April 2003	PT Perusahaan Gas Negara, Medan		
24 April 2003	Jembatan Kali Cideng, belakang kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta		
27 April 2003:	Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta		Tujuh orang cedera
30 Juni 2003	Pasar Aceh, Kota Banda Aceh		Tiga orang terluka
14 Juli 2003	Gedung Dewan Perwakilan Rakyat		
5 Agustus 2003	Hotel JW Marriott, Jakarta	Amran Bin Mansur alias Andi Saputra	14 orang tewas dan 140 orang terluka
7 Agustus 2003	Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	Bachtiar alias Manto	Pelaku tewas
12 September 2003	Daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah		Lima orang cedera
5 Desember 2003	Makassar, Sulawesi Selatan	Agung Hamid	
Januari 2004	Medan, Sumatera Utara	Anggota Gerakan Aceh Merdeka	
Januari 2004	Kafe Samfodo Indah, Palopo, Sulawesi Selatan	Ahmad Rizal, Benard, dkk	
21 Maret 2004	Cimanggis, Depok		
4 Mei 2004	Ruko, Pekanbaru		Dua orang meninggal
26 Juli 2004	KPU, Jakarta		
9 September 2004	Kedutaan Besar Australia, Jakarta		Belasan orang tewas dan 180 orang luka-luka
28 Mei 2005	Tentena, Poso, Sulawesi Tengah		21 orang tewas dan 72 orang cedera

Diolah dari berbagai sumber

b. Efek-efek Negatif Otonomi Daerah

Masalah pungutan semakin parah di era otonomi daerah, masalah kedua yang perlu diperhatikan. Sejak diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah melalui pengesahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999 PD) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU No.25/1999 PKPD), telah terjadi pelimpahan wewenang yang signifikan dari pemegang kekuasaan pusat ke daerah. Dengan belum berjalan dengan baiknya mekanisme pengawasan di negeri ini, praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) -- termasuk di dalamnya berbagai pungutan, korupsi, kolusi, dan nepotisme -- membuat perekonomian banyak berjalan dalam ketidakpastian dan menjadi tak efisien.

Dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004 PD) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU No. 33/2004 PKPD) sebagai usaha merevisi UU No. 22/1999 PD dan UU No.25/1999 PKPD, bukan berarti masalah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah secara otomatis terselesaikan. Masih banyak celah dalam kedua UU tersebut yang dapat digunakan oleh para pemegang kekuasaan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk “bermain” dan mengambil keuntungan pribadi -- dengan biaya yang harus dibayar di dalam bentuk penurunan kesejahteraan masyarakat (*societal welfare*) yang mereka pimpin tentunya, karena adanya transfer kekayaan yang tidak legal (*illicit transfer of wealth*).

Di samping itu, karena UU No.32/2004 PD terlalu menitikberatkan pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan UU No. 33/2004 PKPD juga masih tak jelas, desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah yang berlangsung di negara kita akhirnya sering menghasilkan ketidakteraturan di dalam bentuk ketidakjelasan kebijakan pemerintah daerah maupun tumpang tindih dan sering bertentangnya kebijakan-kebijakan (termasuk berbagai kebijakan perpajakan) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

c. Rumitnya Sistem Perpajakan

Problem lain yang perlu dibenahi dalam rangka perbaikan iklim investasi adalah problem perpajakan. Sistem perpajakan yang kita miliki masih sangat tidak jelas dan berbelit-belit. Hal ini makin diperburuk dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana banyak ditemukan aturan perpajakan yang saling tumpang tindih dan bertentangan antara *level* pemerintah pusat dan daerah. Sebagai sumber pendapatan negara, sektor perpajakan Indonesia harus segera dibenahi. Ketidakjelasan dan berbelit-belitnya proses perpajakan memancing timbulnya praktik-praktik korupsi dan kolusi antara para petugas pemungut pajak dan wajib pajak. Seperti yang disinyalir oleh pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, telah terjadi penyelewengan pajak sekitar 40 trilyun rupiah, yang berasal dari selisih antara target penerimaan pajak tahun lalu yang sebesar 256,6 trilyun rupiah dan potensi penerimaan pajaknya yang kira-kira 300 trilyun.

d. Keterbatasan Infrastruktur

Masalah yang juga perlu dibenahi pemerintahan SBY-Kalla adalah masalah infrastruktur. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang telah ada maupun penyediaan infratraktur-infrastruktur yang baru. Selama periode krisis multidimensi, pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi terbengkalai karena keterbatasan dana pemerintah. Ini bisa dilihat dari rasio investasi pemerintah di bidang infrastruktur terhadap *Gross National Product* (GNP) yang semakin menurun dari 5,3 persen pada tahun 1993 menjadi rata-rata 3,2 persen per tahun pada periode 2000-2004.²⁶

Sebagai akibatnya, kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dimiliki Indonesia dewasa ini menjadi rendah. Bahkan, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan, kualitas dan kuantitas infrastruktur masih jauh dari memadai. Masalah ini tentu akan membuat para calon investor berpikir berulang kali untuk menanamkan uangnya di Indonesia, karena keterbatasan infrastruktur dapat menghambat akses mereka ke sumber daya ekonomi sehingga dapat mengganggu produktivitas dan efisiensi perekonomian dan dapat membuat biaya-biaya yang mereka keluarkan membesar. Membengkaknya biaya-biaya ini dapat berasal dari makin panjangnya rentang waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi (yang diakibatkan karena kurangnya infrastruktur) maupun karena pungutan-pungutan yang

²⁶ Sumber data: Goeltom 8.

dilakukan oleh oknum aparat pemerintah maupun oknum masyarakat yang memanfaatkan masalah kelangkaan infrastruktur ini.

VI. Saran-saran

a. Kepastian (Certainty)

Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis di Indonesia kepada para investor, langkah penting yang harus pemerintah SBY-Kalla lakukan adalah menyediakan kepastian (*certainty*). Kepastian yang diperlukan tak hanya terbatas dalam bentuk kestabilan di bidang ekonomi dan bisnis tetapi juga dalam kestabilan-kestabilan di bidang sosial, keamanan, dan juga hukum. Sementara itu, para ekonom *neo-Keynesian*, seperti peraih Nobel Ekonomi 2001 George A. Akerlof dari *the University of California-Berkeley*, mengingatkan bahwa ada kalanya pasar akan gagal dan tak mencapai keseimbangan karena adanya informasi yang tak sempurna (*imperfect information*). Tipe pertama dari informasi tak sempurna adalah informasi yang tak lengkap (*incomplete information*), yaitu informasi secara tak sengaja tak mencukupi dan tak dimanipulasi oleh siapa pun di pasar, hingga menghalangi alokasi sumber dana yang efisien dan menciptakan kehilangan kesejahteraan (*welfare loses*). Jenis kedua adalah informasi tak simetris (*asymmetric information*), di mana informasi dimanipulasi oleh beberapa aktor ekonomi dan sengaja dibuat tak lengkap.

Ini akan menghasilkan misalokasi sumber-sumber daya dan mengakibatkan kehilangan kesejahteraan lebih lanjut. Sehingga menjadi jelas bila masalah informasi dapat menggiring aktor-aktor ekonomi ke tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakpastian dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, seperti yang dipercaya oleh ekonom-ekonom *neo-Keynesian*, diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menjamin lancarnya arus informasi dan terbentuknya kepastian di pasar. Pemerintah harus menjadi fasilitator tersedianya kepastian di perekonomian bukan malah menjadi faktor penghambatnya. Konsekuensinya, pemerintah harus dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang jelas sekaligus dapat menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan berhasilnya peran fasilitator pemerintah ini, diharapkan terciptanya iklim berusaha yang kompetitif

dan kondusif di perekonomian kita. Lebih jauh, pemerintah juga tidak boleh lupa untuk mengembalikan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor. Ini semua pada gilirannya akan membangkitkan investasi swasta, baik asing maupun domestik, di perekonomian kita.

b. Perbaikan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat dan daerah harus dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik. Ini dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak saling bertentangan dan tumpang tindih antara level pusat dan daerah. Adanya peraturan-peraturan yang tak sinkron antara level pusat dan daerah akan membingungkan para investor, baik yang potensial maupun yang sudah menjalankan usahanya di perekonomian kita. Ini akan membuat iklim berusaha di Indonesia menjadi semakin tidak menarik. Masalah ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kita.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi ekonomi yang bangsa kita jalani sekarang, pemegang kekuasaan di daerah, baik cabang eksekutif maupun legislatif, harus disadarkan bahwa kewenangan-kewenangan baru yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke tangan mereka dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas di daerah yang mereka pimpin masing-masing, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi maupun kelompok mereka sendiri. Oleh karenanya, untuk menjaga agar tidak banyak terjadi penyelewengan kewenangan, pemerintah pusat -- melalui lembaga-lembaga negara penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman -- dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat meningkatkan fungsi pengawasannya dalam rangka mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ekonomi. Untuk ini, koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum pemerintah dan KPK harus dapat terjalin rapi Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis di Indonesia kepada para investor, langkah penting yang harus pemerintah SBY-Kalla lakukan adalah menyediakan kepastian (*certainty*). Kepastian yang diperlukan tak hanya terbatas dalam bentuk kestabilan di bidang ekonomi dan bisnis tetapi juga dalam kestabilan-kestabilan di bidang sosial, keamanan, dan juga hukum.

c. Perbaiki Masalah Perpajakan

Problem perpajakan perlu dipecahkan dengan diperkenalkannya sistem perpajakan yang sesederhana mungkin, prosedurnya yang sesingkat mungkin, dan interaksi antara petugas pemungut pajak dan wajib pajak yang sesedikit mungkin. Sebuah sistem perpajakan yang sederhana, singkat, dan tak melibatkan banyak interaksi antara petugas pemungut pajak dan wajib pajak akan memacu para wajib pajak untuk membereskan semua urusan pajak sesuai prosedur baku, karena hal ini akan lebih kecil biaya-biaya dan resikonya ketimbang harus terlibat dalam praktik-praktik kolusi dengan oknum petugas pemungut pajak. Ini tentu akan membuat kebocoran penerimaan pajak dapat diminimalisasi.

Untuk memperbesar penghasilan dari sektor perpajakan, pemerintahan SBY-Kalla perlu melakukan usaha-usaha untuk memperluas basis pajaknya (*tax base*). Langkah-langkah untuk memperluas *tax base* akan lebih efektif dalam usaha pemerintah untuk memperbesar penghasilan dari perpajakan di satu pihak dan memperbaiki iklim investasi di pihak yang lain, ketimbang langkah-langkah untuk menaikkan tingkat-tingkat pajak (*tax rates*). Terlalu tingginya *tax rates* akan menyebabkan penerimaan pemerintah dari perpajakan akan menurun. Studi tentang *tax rates* dalam kaitannya dengan penerimaan pemerintah dari perpajakan (*tax revenue*) dipelopori oleh Arthur Laffer²⁷ yang populer dengan *the Laffer Curve*-nya. Menurutny, *tax revenue* akan mencapai titik tertinggi pada *tax rate* jauh di bawah 100 persen. Logika yang mendasari teori ini sangatlah sederhana: pada *tax rate* nol persen, tidak ada pendapatan yang dipungut pemerintah; begitu pun pada *tax rate* 100 persen, pendapatan pemerintah akan kembali nol karena tidak ada orang yang mau bersusah payah berusaha hanya untuk menyerahkan seluruh hasilnya ke pemerintah dalam bentuk pajak. Minimalisasi kebocoran pajak dan perluasan *tax base* tersebut akan membuat rasio pajak (*tax ratio*) -- yang pada tahun 2005 baru pada tingkat sekitar 13,5 persen dari GDP -- dapat ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target yang dicanangkan pemerintahan SBY-Kalla untuk diraih pada 2009 sebesar 19,5 persen dari GDP.

²⁷ Ekonom asal the University of Southern California yang berpengaruh di AS dalam masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik, salah satu Presiden AS yang paling populer di Abad 20. Professor Laffer adalah Bapak dari the Supply-side Economics, kebijakan ekonomi pemerintahan Ronald Reagan.

d. Perbaikan Infrastruktur

Dalam menghadapi masalah di sektor infrastruktur, mengingat kurang baiknya situasi keuangan pemerintah sekarang, maka pemerintahan SBY-Kalla perlu menggalakkan peran serta pihak swasta, baik asing maupun domestik, di dalam hal pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah tak bisa lagi hanya mengandalkan jalur *Government to Government (G to G)* dalam usaha-usaha penyediaan infrastruktur, seperti yang dilakukan selama era Orde Baru dengan usaha-usaha mendapatkan pinjaman lunak (*soft loans*) dari negara-negara donor. Untuk itu, pemerintahan SBY-Kalla perlu menawarkan program-program penyediaan infrastruktur yang menarik untuk pihak swasta -- program *build, operate, and transfer (BOT)* dengan berbagai insentif seperti panjangnya waktu konsesi, misalnya.

Infrasructure Summit yang telah diselenggarakan oleh pemerintah SBY-Kalla patut untuk dihargai. Tetapi usaha yang dilakukan pemerintah tak boleh berhenti pada tahap itu saja, karena pemerintah harus segera menindaklanjutinya dengan program-program penyediaan infrastruktur yang kongkrit. Untuk itu, perlu dipikirkan dengan matang proyek-proyek apa saja yang dapat kita tawarkan ke para investor potensial. Proyek-proyek ini tak saja harus menguntungkan secara finansial bagi para calon investor, tetapi juga akan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi proses pembangunan ekonomi di negara kita.

VII. Kesimpulan

Tak bisa dipungkiri, kegiatan investasi mempunyai posisi yang sangat krusial dalam usaha-usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan proses pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Pengalaman beberapa tahun belakangan ini memperlihatkan pemulihan perekonomian yang hanya ditopang sektor konsumsi ternyata tak membawa penciptaan lapangan kerja yang memadai. Pemecahan masalah pengangguran harus dilakukan pemerintahan SBY-Kalla secara hati-hati dan menyeluruh, karena masalah ini mempunyai implikasi ekonomi, sosial, hukum, dan politik yang luas. Angka pengangguran yang tinggi dapat menciptakan kerawanan sosial yang tak sehat. Oleh

karenanya, kebijakan-kebijakan dalam rangka pemecahan masalah pengangguran tak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan dalam rangka perbaikan iklim investasi. Jika kita ingin masalah pengangguran pada umumnya (dan masalah *jobless recovery* pada khususnya) dapat terselesaikan, kita harus menarik kembali investasi, baik asing maupun domestik, ke perekonomian kita (Tabel 5).

Tabel 5

**Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal
1967/1968 – 31 Maret 2005**

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Nilai (Rp. Milyar)	Proyek	Nilai (Rp. Milyar)
1967	-	-	13	210.6
1968	27	38.6	35	256.4
1969	73	36.6	37	127.5
1970	175	1,296.5	87	170.2
1971	216	218.3	64	310.4
1972	268	184.9	48	171.7
1973	301	492.4	70	338.5
1974	134	214.6	55	565.6
1975	79	160.1	24	1,153.9
1976	77	401.6	22	251.2
1977	157	490.2	21	187.3
1978	188	751.4	23	237.0
1979	167	682.4	13	237.0
1980	165	1,589.9	21	1,081.3
1981	164	2,384.9	24	747.0
1982	209	3,767.1	32	2,456.1
1983	341	6,574.2	46	2,436.8
1984	145	2,283.5	23	1,121.1
1985	245	3,790.1	46	913.1
1986	315	4,706.0	93	1,056.8
1987	571	10,682.9	141	1,918.1
1988	850	14,414.1	147	4,447.7
1989	869	19,639.5	308	4,898.3
1990	1,331	58,856.6	444	9,639.6
1991	808	41,210.8	390	9,030.2
1992	422	29,395.9	304	10,466.1
1993	547	39,715.9	330	8,153.8
1994	825	53,598.3	444	27,046.4
1995	793	69,844.7	782	39,891.6
1996	807	97,401.1	947	29,941.0
1997	719	119,320.5	778	33,665.7
1998	323	57,999.2	958	13,635.0
1999	239	53,930.8	1,179	10,894.3
2000	412	95,450.3	1,592	16,020.8
2001	264	58,856.6	1,366	15,189.5

2002	187	25,370.5	1,223	9,931.7
2003	227	53,080.6	1,225	14,187.2
2004	191	42,906.8	1,206	10,305.7
2005	50	9,083.9	322	4,282.3

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Catatan:

1. Proyek: Jumlah Proyek = Proyek Baru + Alih Status
2. Nilai Investasi = Proyek Baru + Perluasan + Alih Status
3. Data tahun 2002, 2003 dan 2004 berubah dari data BKPM periode Laporan Desember 2004 disebabkan pada bulan Januari 2005 BKPM menerima surat persetujuan yang diterbitkan oleh daerah
4. Data Sementara, termasuk persetujuan yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Maret 2005

Oleh sebab itu, kita juga harus memulihkan sektor investasi agar pertumbuhan angkatan kerja yang sekitar dua juta orang per tahun dapat diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, sehingga masalah pengangguran yang memiliki potensi gangguan stabilitas dan keamanan cukup tinggi dapat dihindari. Kebijakan-kebijakan sektor investasi harus dapat menarik para investor untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tapi kebijakan ini jangan sampai mengorbankan hak-hak pekerja. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus memberikan perlindungan kepada pekerja, tapi kebijakan-kebijakan tersebut jangan sampai membuat iklim investasi menjadi lebih tak menarik untuk para investor potensial.

Terjadinya fenomena *jobless recovery* membuktikan bahwa eksternalitas pasar tenaga kerja masih menjadi isu besar di Indonesia. Efek pihak ketiga (*third-party effects*), atau eksternalitas (*externalities*), adalah efek baik atau buruk atas aktor-aktor yang tak secara langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan produksi dan konsumsi. Robert E. Lane, pelopor ilmu psikologi politik, mengemukakan bahwa sumber utama kebahagiaan, atau kepuasan pribadi, seringkali dianggap sebagai eksternalitas. Beberapa contoh eksternalitas yang menjadi sumber kebahagiaan adalah lapangan pekerjaan (*employment*), jaminan kerja (*work security*), karir yang menjanjikan, kenyamanan kerja (*work enjoyment*), dan bahkan pengasahan keahlian (*skills*).

Eksternalitas-eksternalitas ini terabaikan karena para produsen memandangnya sebagai biaya-biaya (*costs*), sementara barang (*goods*) dan jasa (*services*) dianggap sebagai pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*profits*). Oleh karena itu, para produsen

dan investor masih memilih industri yang padat modal dibanding industri yang padat karya dalam menanamkan investasinya di Indonesia. Ini disebabkan karena mereka memandang eksternalitas-eksternalitas di atas sebagai biaya-biaya belaka. Untuk membereskan permasalahan ini, pemerintah -- begitu pula para produsen dan investor -- harus disadarkan bahwa perbaikan dalam eksternalitas akan meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat, yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat *output*, atau pendapatan nasional. Sedangkan, ketiadaan akan meletakkan hambatan terhadap produktivitas dan juga kebahagiaan. Berhasil diperbaikinya tingkat produktivitas pekerja di Indonesia akan menambah faktor pendorong bagi bangkitnya kegiatan investasi, baik oleh investor asing maupun dalam negeri, di negeri kita.

Salah satu strategi untuk mengatasi masalah tersendatnya investasi di Indonesia adalah pemerintah perlu mempercepat proses penyederhanaan sistem pengurusan perizinan investasi. Dari dua alternatif penyederhanaan yang ada -- yakni, proses pengurusan perizinan satu atap atau sistem pengeluaran perizinan melalui jalur departemen-departemen teknis -- perlu segera dilakukan studi mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan keunggulan-keunggulan masing-masing pilihan. Yang berlaku selama ini, proses penentuan apakah calon investor dimasukkan dalam daftar hitam, proses pendaftaran calon investor, dan proses pengeluaran izin untuk investor masih dilakukan di instansi yang terpisah.

Perlu secepatnya dipelajari, apakah sistem ini memberikan output yang optimal, dan apakah penyederhanaan dalam prosedur dapat dilakukan sehingga bentuk prosedur, jumlah prosedur, dan waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan izin dapat diperbaiki secara signifikan. Agar diperoleh hasil yang obyektif dan komprehensif, dalam melakukan studi ini pemerintah sebaiknya melibatkan berbagai instansi terkait -- seperti Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Departemen Keuangan (termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), dan Departemen Luar Negeri -- dan mengikutsertakan peran publik, yang bisa diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian independen.

Pemerintah pun perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan investasi yang menarik investor untuk menanamkan investasinya tak hanya di pulau Jawa, Sumatera, dan

Kalimantan, tapi juga di pulau-pulau lainnya, termasuk di pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Data-data BKPM menunjukkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama ini terkonsentrasi di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan (Tabel 6 dan 7). Sedangkan penanaman modal asing biasanya hanya terpusat di pulau Jawa dan Sumatera (Tabel 8 dan 9). Untuk menunjang usaha-usaha promosi daerah tujuan investasi di daerah, pemerintah daerah harus dengan giat menggali potensi daerah mereka masing-masing. Kegiatan penggalian potensi daerah ini sebaiknya dilakukan dengan bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, seperti lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tabel 6

**Perkembangan Persetujuan Nilai PMDN Menurut Lokasi,
1997 – 31 Maret 2005**

LOKASI	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Sumatera	33,567.4	10,727.0	15,137.6	37,766.4	9,231.3	6,236.3	6,463.0	13,081.4	1,777.0
Jawa	63,463.2	18,639.6	21,878.1	19,006.9	20,516.1	12,748.2	11,509.8	23,106.0	2,406.5
Bali & Nusa Tenggara	1,997.3	2,110.0	1,190.8	877.4	2,187.6	3.8	836.8	830.2	2,850.2
Kalimantan	13,663.8	12,213.8	5,459.0	5,823.0	3,769.0	2,669.6	3,483.6	2,845.1	1,305.6
Sulawesi	3,857.2	12,985.5	1,829.3	31,934.1	20,015.1	3,469.3	29,788.6	2,860.0	711.8
Maluku	1,060.0	44.6	20.0	-	-	68.0	2.9	140.1	-
Papua	1,711.6	1,278.7	8,416.0	42.5	3,137.5	175.3	995.9	44.0	32.8
JUMLAH	119,320.5	57,999.2	53,930.8	95,450.3	58,856.6	25,370.5	53,080.6	42,906.8	9,083.9

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Catatan:

1. I: Nilai Investasi dalam Rp. Milyar = Proyek Baru + Perluasan + Alih Status
2. Data tahun 2002 dan 2004 berubah dari data BKPM periode Laporan Desember 2004 disebabkan pada bulan Januari 2005 BKPM menerima surat persetujuan yang diterbitkan oleh daerah
3. Data Sementara, termasuk persetujuan yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Maret 2005

Tabel 7
Perkembangan Persetujuan Jumlah Proyek PMDN Menurut Lokasi,
1997 – 31 Maret 2005

Lokasi	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Sumatera	142	59	49	72	47	35	52	49	12
Jawa	432	176	120	250	148	111	110	97	27
Bali & Nusa Tenggara	29	33	22	19	25	3	15	12	3
Kalimantan	71	22	21	44	26	19	25	14	6
Sulawesi	32	23	23	26	14	13	18	15	2
Maluku	4	4	1	-	-	2	-	3	-
Papua	9	6	3	1	4	4	7	1	-
JUMLAH	719	323	239	412	264	187	227	191	50

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Catatan:

1. P: Jumlah Proyek = Proyek Baru + Alih Status
2. Data tahun 2002 dan 2004 berubah dari data BKPM periode Laporan Desember 2004 disebabkan pada bulan Januari 2005 BKPM menerima surat persetujuan yang diterbitkan oleh daerah

Data Sementara, termasuk persetujuan yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Maret 2005

Tabel 8
Perkembangan Persetujuan Nilai PMA Menurut Lokasi,
1997 – 31 Maret 2005

Lokasi	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Sumatera	11,165.3	1,42.2.4	7,661.0	3,044.6	2,350.7	2,070.5	3,050.1	1,133.2	630.8
Jawa	20,487.3	10,846.5	2,654.4	11,106.8	5,882.0	4,916.4	7,832.9	8,103.9	3,332.4
Bali & Nusa	130.4	370.4	198.6	1,532.0	525.5	209.6	1,608.7	435.3	54.3

Tenggara									
Kalimantan	939.8	722.7	215.4	208.7	245.4	2,238.2	1,046.5	158.3	257.3
Sulawesi	420.6	257.8	139.9	76.1	81.1	420.5	425.2	366.1	3.5
Maluku	17.8	4.9	1.8	0.1	9.3	-	3.0	59.9	4.0
Papua	504.5	10.3	23.2	52.5	6,095.5	76.5	220.8	49.0	-
JUMLAH	33,665.7	13,635.0	10,894.3	16,020.8	15,189.5	9,931.7	14,187.2	10,305.7	4,282.3

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Catatan:

1. I: Nilai Investasi dalam US\$. Juta = Proyek Baru + Perluasan + Alih Status
2. Data tahun 2002, 2003 dan 2004 berubah dari data BKPM periode Laporan Desember 2004 disebabkan pada bulan Januari 2005 BKPM menerima surat persetujuan yang diterbitkan oleh daerah
3. Data Sementara, termasuk persetujuan yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Maret 2005

Tabel 9

**Perkembangan Persetujuan Jumlah Proyek PMA Menurut Lokasi,
1997 – 31 Maret 2005**

Lokasi	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Sumatera	99	141	133	161	142	108	133	124	27
Jawa	616	682	858	1,247	1,025	958	924	880	246
Bali & Nusa Tenggara	20	90	145	134	134	100	98 37	140 35	39
Kalimantan	24	19	11	22	43	30	24	19	9
Sulawesi	14	21	26	24	15	20			1
Maluku	1	3	3	-	3	-	1	3	-
Papua	4	2	3	4	4	7	8	5	-
JUMLAH	778	958	1,179	1,592	1,366	1,223	1,225	1,206	322

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Catatan:

1. Jumlah Proyek = Proyek Baru + Alih Status
2. Data tahun 2002, 2003 dan 2004 berubah dari data BKPM periode Laporan Desember 2004 disebabkan pada bulan Januari 2005 BKPM menerima surat persetujuan yang diterbitkan oleh daerah
3. Data Sementara, termasuk persetujuan yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Maret 2005

Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dan tak tumpang tindih antara level pusat dan daerah.

Untuk membuat usaha-usaha perbaikan di bidang investasi fokus, saling terkait, dan mendukung, kehadiran UU Penanaman Modal (Investasi) yang lengkap dan komprehensif memang sangat dinantikan. Untuk itu, pemerintah SBY-Kalla dan DPR harus mempercepat proses pembahasan dan pengesahannya. Dengan hadirnya UU Investasi tersebut, kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh elemen-elemen pemerintah, baik di pusat maupun daerah, akan dapat lebih fokus dan terarah, sehingga akan memberikan arahan yang jelas kepada para investor yang akan maupun yang telah beroperasi di Indonesia.

UU Penanaman Modal yang baru tersebut sebaiknya memperjelas fungsi dan peranan BKPM. Apakah BKPM tetap diberikan wewenang sebagai lembaga yang dapat mengeluarkan perizinan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA)? Atau, apakah BKPM dirubah fungsinya hanya sebagai lembaga yang bertugas melakukan promosi atas peluang berinvestasi di Indonesia? Bila BKPM dirubah fungsinya hanya sebagai lembaga promosi tanpa wewenang perizinan, BKPM harus dioptimalkan dalam menjalankan fungsinya tersebut sebagai ujung tombak operasi pemasaran investasi kita di luar negeri. Selama ini, kegiatan memperkenalkan potensi-potensi investasi nasional -- apalagi potensi investasi daerah -- ke dunia internasional masih jauh dari cukup, oleh karenanya sebuah kehadiran sebuah lembaga yang dapat berkonsentrasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas promosi investasi sangatlah dibutuhkan, mengingat negara-negara pesaing kita sudah lebih dulu melakukannya dengan gencar. Bila tidak memulai sekarang, kita mungkin tidak akan dapat mengejar ketertinggalan kita.

Sekali lagi, jika pemerintahan baru ini memang berniat memulihkan iklim investasi di Indonesia yang memburuk sejak ditimpa krisis multidimensi, yang paling utama dan penting untuk disediakan adalah kepastian dalam melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Kepastian ini meliputi kestabilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan tentunya juga hukum. Kehadiran kepastian dalam bidang-bidang tersebut akan mengurangi besarnya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dalam perekonomian

yang sangat mengganggu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Adanya kepastian berusaha di Indonesia akan mengembalikan kepercayaan (*confidence*) masyarakat luas dan investor yang sempat sirna ketika krisis moneter melanda negeri ini. Dengan kembalinya kepercayaan, kita dapat mengharapkan terjadinya *capital inflows* yang besar, yang dapat mengganti (*to offset*) *capital outflows* yang besar pada masa krisis (FDI antara tahun 2000 dan 2002 menunjukkan perkembangan negatif sebesar rata-rata 3,11 milyar dollar AS per tahun).

Bangkitnya kembali investasi, baik investasi asing maupun dalam negeri, akan sangat tergantung kepada iklim berusaha yang sehat dan adanya kejelasan atas mekanisme dan prosedur penanaman modal di Indonesia. Iklim usaha yang sehat untuk berinvestasi akan sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi perekonomian Indonesia. Iklim berusaha dan kondisi makroekonomi yang cerah akan meningkatkan peran sektor swasta dalam mendorong bergeraknya perekonomian negara kita. Tumbuhnya investasi swasta ini akan menjadi semakin cepat bila pemerintah mau dan mampu untuk merumuskan kebijakan investasi yang tepat (dengan dikeluarkannya UU Investasi yang baru, misalnya), meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat luas (termasuk komunitas bisnis), dan menyertakan peran masyarakat luas secara riil dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program investasi dan pembangunan.

Berhasil tumbuhnya ekonomi Indonesia pada *level* 5,13 persen per tahun pada tahun 2004, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2003 sebesar 4,2 persen, harus disikapi pemerintahan SBY-Kalla dengan tepat. Prestasi ini tentunya tak dapat diklaim sebagai hasil kerja pemerintahan mereka, melainkan jerih payah dari pemerintahan sebelumnya. Menjadi tugas pemerintahan yang baru untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan *level* pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang.

Memperhatikan studi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), terjadi perkembangan yang menarik dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2004. Beberapa tahun belakangan ini, kita dikuatirkan sebuah kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi kita hanya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Angka-angka tahun 2003 membenarkan kekhawatiran ini: dari pertumbuhan ekonomi 4,2 persen,

pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 2.8 persen (66 persen dari total pertumbuhan GDP 2003). Di tahun 2004, secercah harapan mulai timbul dengan perkembangan yang terjadi pada investasi kita. Dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13 persen pada 2004, 3,1 persen adalah sumbangan dari kegiatan investasi (60 persen dari total tingkat pertumbuhan 2004). Ini merupakan kenaikan yang cukup tinggi, mengingat pada 2003 kegiatan investasi hanya menyumbang 0.3 persen kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia (hanya 7 persen dari total level pertumbuhan ekonomi 2003).

Momentum perubahan ekonomi yang baik ini harus segera ditanggapi pemerintahan SBY-Kalla dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong perbaikan iklim investasi. Selain langkah-langkah yang telah disebutkan, pemerintahan baru ini juga perlu membenahi dengan cepat sektor perbankan kita. Inefisiensi perbankan, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis moneter di tahun 1997, harus dengan segera dikurangi. Fungsi intermediasi perbankan harus dipulihkan kembali, karena tanpa pulihnya fungsi *vital* ini sektor riil mengalami kesulitan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan produktifnya sehingga kegiatan investasi pun menjadi terhambat.

Dalam rangka pembenahan sektor perbankan, perlu dicermati wacana tentang investasi asing di sektor perbankan kita. Studi yang dilakukan oleh ekonom J. Kimball Dietrich²⁸ tentang dampak investasi asing di sektor perbankan Thailand dan Korea Selatan menyimpulkan bahwa pembukaan sektor perbankan terhadap investasi asing dapat membawa perbaikan-perbaikan pada sektor ini, antara lain: menguatnya permodalan bank, meningkatnya efisiensi usaha, membaiknya *risk management*, meluasnya peran swasta asing dalam pembiayaan proyek strategis jangka panjang seperti proyek-proyek infrastruktur, dan meningkatnya jumlah produk dan jasa keuangan baru. Namun, di samping perbaikan-perbaikan tersebut, studi Profesor Dietrich juga mendeteksi beberapa pengaruh negatif investasi asing di sektor perbankan, seperti mengecilnya perhatian pada usaha kecil, membesarnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mengentalnya orientasi keuntungan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah untuk meminimalisasi efek-efek negatif tersebut menjadi penting adanya.

²⁸ Pengajar the University of Southern California yang juga aktif sebagai koordinator penelitian pada Financial Markets Development Project, program dari the Pacific Economic Cooperation Council (PECC) yang mempelajari kebijakan-kebijakan untuk pengembangan pasar-pasar keuangan di 21 negara Asia Pasifik dan untuk meminimalisasi dampak ekonomi dari krisis keuangan Asia 1997.

Selanjutnya, ketegasan pemerintah untuk memberantas korupsi juga menjadi hal yang sangat diharapkan. Merujuk pada Vilfredo Pareto²⁹, sumber-sumber daya suatu perekonomian telah dimanfaatkan secara efisien bila tak mungkin lagi menggunakannya dengan cara lain untuk membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain menjadi lebih buruk. Oleh sebab itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala wujudnya--seperti pungutan-pungutan, praktik-praktik mark-up, dan praktik-praktik penyelundupan, baik ke luar maupun ke dalam negeri --harus dipandang sebagai infisiensi pada contoh-contoh terburuknya karena dapat merusak proses alokasi sumber daya yang sehat. Kita seharusnya dapat memanfaatkan uang yang dapat diselamatkan dari tindakan-tindakan korupsi untuk kegiatan-kegiatan yang dapat secara riil meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, bukan hanya segelintir pencuri berjas saja.

Untuk itu, pemerintahan SBY-Kalla perlu memperkenalkan mekanisme penyediaan barang dan jasa publik yang lebih kompetitif dan transparan untuk menghindari praktik-praktik kolusi maupun korupsi. Pemerintahan ini juga perlu memperbaiki kualitas lembaga-lembaganya, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum, dengan memberantas korupsi dan kolusi dalam sistem rekrutmen dan kenaikan pangkat pegawai sehingga birokrat-birokrat yang bersih dan mempunyai integritas dapat dihasilkan, mengingat selama ini birokrat-birokrat yang kotor telah menjadi masalah utama dalam berbagai permasalahan korupsi di Indonesia.

*****^^*****

²⁹ Ekonom Italia terpendang dari the University of Luzanne yang berkarya di akhir abad 19 dan terkenal dengan studi tentang efisiensi.

Investasi Sektor Perminyakan: Sebuah Contoh Kasus

Keputusan resmi pemerintah untuk menaikkan harga-harga BBM sebesar rata-rata 29 persen pada 1 Maret yang lalu tak mengakhiri debat panjang ini. Berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat berdemonstrasi menuntut pembatalan atau penundaannya. Para ekonom yang berbeda aliran pemikiran (*schools of thought*) saling mengkritik model, berikut asumsi dan kesimpulan, penelitian masing-masing tentang subsidi BBM dan efek program-program kompensasinya.

Penulis berpendapat, tak sepatutnya kita terjebak di dalam adu otak--apalagi adu otot--yang berlarut-larut. Kita sebaiknya menyisakan energi untuk mencermati perkembangan yang lebih mencemaskan, yaitu pudarnya sektor perminyakan Indonesia. Kenaikan harga BBM--yang sejak tahun 2000 telah terjadi sebanyak 12 kali (ini hanya mencakup kenaikan harga-harga minyak tanah, solar, serta premium, dan tidak termasuk kenaikan harga-harga pertamax dan pertamax plus)--harus kita pandang sebagai lampu kuning, atau peringatan, terhadap perkembangan mengkhawatirkan sektor perminyakan.

Setelah mencapai *level* produksi tertinggi sekitar 1,6 juta *barrel* per hari (bph) 11 tahun yang lalu dan masih menghasilkan 1,4 juta bph pada tahun 2000, Indonesia hanya memproduksi sekitar 1 juta bph tahun lalu. Penurunan produksi minyak mentah (*crude oil*) ini terjadi ketika harga-harga minyak mentah di pasar dunia mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (sekitar 58 dollar AS per *barrel*). Hal ini membuat Indonesia gagal untuk mengulang suksesnya pada periode *oil boom* 1973-1981, ketika negara ini berhasil meraih keuntungan tak terduga (*windfall profits*) yang besar.

Patut untuk dipahami, industri hulu sektor perminyakan--yang mencakup pengeksplorasian dan pengeksploitasi minyak mentah--memerlukan investasi milyaran dollar AS, teknologi yang tinggi, dan waktu yang cukup lama untuk membuahkan hasil (bisa mencapai 10 tahun hanya untuk kegiatan eksplorasinya). Karena masalah keterbatasan dana dan juga teknologi, sejak awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan apa yang dikenal sebagai *the Indonesian Formula*, yaitu skema *Production-Sharing Contract* (PSC) untuk mengundang investasi asing, dimana minyak mentah yang berhasil dieksploitasi dibagi di antara pemerintah, Pertamina, dan investor.

Sejak diperkenalkan, *formula* tersebut telah diterapkan di berbagai negara dalam versi yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, terdapat 4 macam PSC: *Technical Assistance Contract* (TAC), *Production-Sharing Contract* (PSC), *Joint Operational Agreement* (JOA), dan *Enhanced Oil Recovery Contract* (EORC). Umumnya, kontrak-kontrak kerja sama tersebut berlaku selama 20 tahun, dengan skema bagi hasilnya: 65 persen dimiliki pemerintah dan 35 persen

untuk Pertamina dan investor yang menjadi *partner*-nya (dulu, 85 persen bagian pemerintah, sedangkan 15 persen porsi Pertamina dan *partner*).

Selanjutnya, di industri hilirnya, minyak mentah ini kemudian diolah menjadi BBM di kilang-kilang--seperti kilang Cilacap, Balongan, Pangkalan Brandan, dan Balikpapan--di beberapa daerah di tanah air, yang membutuhkan investasi ratusan juta dollar AS per kilangnya. Mengingat kebutuhan Indonesia akan minyak mentah untuk bahan baku BBM yang sekitar 1,4 juta bph dan tidak semua *output* minyak mentah Indonesia digunakan di dalam negeri karena ada bagian investor yang dilempar ke pasar dunia, kita kekurangan pasokan bahan baku untuk memproduksi BBM sehingga harus mengimpor sekitar 400 ribu bph.

Bila masalah penurunan produksi minyak mentah ini berkelanjutan, kita bisa kehilangan keanggotaan OPEC, karena besar kemungkinan kita tak mampu mengekspor minyak mentah lagi. Bahkan, sejak tahun lalu kita sudah diklasifikasikan sebagai pengimpor netto, yang artinya *volume* minyak mentah yang kita impor lebih besar dari yang kita ekspor.

Permasalahannya berlipat, mengingat seluruh kilang yang kita miliki--dengan kapasitas produksi total sekitar 1 juta bph saja--hanya bisa untuk mencukupi antara 70 sampai 75 persen total konsumsi BBM dalam negeri. Konsekuensinya, Indonesia harus membeli sisanya di pasar BBM dunia untuk memenuhi total konsumsinya.

Menelaah permasalahan ini, kita akan menemui beberapa hal penyebab kemerosotan produksi minyak mentah Indonesia. Pertama, menurut data Asosiasi Perminyakan Indonesia (API), kemerosotan *output* minyak mentah Indonesia disebabkan utamanya oleh kenyataan bahwa 70 persen sumur minyak yang ada telah tua, dan sumur tua ini menghasilkan 88 persen dari total *output* minyak mentah kita.

Kedua, penurunan produksi minyak mentah Indonesia juga dapat dikaitkan dengan jatuhnya investasi di industri perminyakan, yang menyebabkan proses eksplorasi dan eksploitasi menjadi surut.

UU No. 22 tentang Minyak dan Gas Bumi--yang disahkan pada tahun 2001 untuk merevisi UU No. 8 Tahun 1971--memainkan peran penting dalam mempertahankan--dan bukannya menyelesaikan--masalah pudarnya sektor perminyakan Indonesia, karena UU tersebut membantu menetaskan sebuah industri minyak yang tidak efisien.

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang UU No. 22 Tahun 2001 ciptakan untuk mengambil-alih peran *regulator* Pertamina telah berkembang menjadi organisasi dengan prosedur birokratik yang panjang, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian di industri ini.

Beberapa masalah lain yang perlu diperhatikan adalah: ancaman diambilnya beberapa sumur potensial oleh negara-negara tetangga, seperti yang sekarang berlangsung terhadap Blok Ambalat di Laut Sulawesi; tumpang tindihnya peraturan perundangan, terutama antara *level* lokal dan nasional; penundaan pembayaran kembali (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah, yang mencapai 150 juta dollar AS pada 2004; gangguan-gangguan keamanan, baik dari gerakan separatis bersenjata, konflik sosial, maupun dari para kriminal; dan membengkaknya "harga-harga" untuk berurusan dengan aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama di era otonomi daerah sekarang ini.

Untuk mengeluarkan Indonesia dari masalah penurunan produksi minyak mentah ini, pemerintah SBY-Kalla perlu menarik kembali investasi ke dalam sektor perminyakan kita. Pertama, pemerintah harus membuat para investor minyak yang telah beroperasi di perekonomian kita merasa aman akan investasi yang telah mereka tanamkan dengan mewujudkan kepastian dalam menjalankan kegiatan produktif di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah harus, di antaranya, menghormati semua kontrak dengan rekanan PSC-nya, termasuk seluruh kewajiban hukum yang menyertainya. Semua perselisihan kontrak yang melibatkan pemerintah dan para *partner*-nya (sebagai contoh, perselisihan atas blok Cepu antara Pertamina dan ExxonMobil) harus dicarikan penyelesaian cepat dan saling menguntungkan (*win-win solution*).

Kepastian tersebut akan membuat perusahaan-perusahaan minyak beroperasi secara efisien--membuat mereka mampu memangkas banyak biaya, baik resmi maupun tidak. Hasilnya, para investor ini dapat mendatangkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan pada gilirannya akan--dengan kisah keberhasilan mereka--menarik banyak pemain baru untuk berinvestasi di Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah berkewajiban menyediakan hukum perundang-undangan, beserta peraturan pelaksanaannya, yang jelas. Lingkungan berusaha yang kondusif pun perlu diciptakan oleh pemerintah melalui perbaikan dan penyederhanaan sistem perpajakan; peluncuran program insentif; dan juga pemberantasan korupsi dan kolusi. Di sini kehadiran pemerintah sangatlah diperlukan, mengingat--seperti yang diyakini oleh para ekonom *new Keynesian* seperti Lawrence Summers--gejolak dalam *output* sering disebabkan oleh masalah informasi yang tak komplis dan asimetris, sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting.

Seiring diperbaikinya iklim investasi di sektor perminyakan, pemerintah harus menyiapkan strategi industri sektor perminyakan yang komprehensif. Pemerintah tak bisa lagi hanya mengandalkan pengembangan industri hulu sektor ini (eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah) seperti yang berlangsung selama ini, pemerintah juga harus mulai memajukan industri hilirnya (pengilangan BBM).

Berkembangnya industri hulu dan hilir sektor perminyakan secara simultan akan membantu perkembangan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, ladang Cepu yang mempunyai cadangan antara 700 juta sampai 2 milyar *barrel* minyak--yang bernilai sekitar 38,5 milyar (385 trilyun) sampai 110 milyar dollar AS (1100 trilyun rupiah)--akan menambah pendapatan negara secara signifikan bila dikelola dengan benar. Ini perlu dibarengi oleh eksploitasi ladang-ladang potensial lainnya, serta pembangunan kilang-kilang BBM baru (dengan melibatkan para investor; tak seperti kebiasaan lama yang mengandalkan investasi pemerintah saja) untuk memenuhi konsumsi domestik maupun pasar ekspor BBM.

Suksesnya strategi industri, selain akan menghilangkan ketergantungan Indonesia akan produk minyak asing dan melepaskan negara ini dari pengaruh fluktuasi harga dunia, juga akan membuat Indonesia meraih peluang keuntungan yang besar, mengingat permintaan akan minyak mentah dan BBM dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti China dan India, masih besar dan akan membuat harga minyak tetap tinggi di tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya, uang yang didapat dari sektor perminyakan ini dapat dimanfaatkan untuk mendanai program-program pembangunan sosial yang secara nyata menyentuh rakyat.

Sebaliknya, kegagalan untuk menemukan dan mengeksploitasi cadangan-cadangan minyak baru akan mengakibatkan deindustrialisasi sektor perminyakan dan turunnya total *output* minyak dari ladang yang telah ada sebesar 50 persen di dekade yang akan datang. Untuk itu, tersedianya kebijakan energi nasional komprehensif--yang melibatkan semua lembaga terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah--yang utamanya berisi strategi diversifikasi energi sangatlah penting.

Bibliography

- Central Bureau of Statistics. 1972.
Statistical Pocketbook of Indonesia 1970 & 1971. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Central Bureau of Statistics. 1975.
Statistical Pocketbook of Indonesia 1974/1975. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Central Bureau of Statistics. 1979.
Statistical Yearbook of Indonesia 1977-1978. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Central Bureau of Statistics. 1984.
Statistical Yearbook of Indonesia 1983. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Central Bureau of Statistics. 1991.
Statistical Yearbook of Indonesia 1990. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Central Bureau of Statistics. 1996.
Statistical Yearbook of Indonesia 1995. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Central Bureau of Statistics. 2000.
Statistical Yearbook of Indonesia 1999. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Central Bureau of Statistics. 2004.
Statistical Yearbook of Indonesia 2003. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Goeltom, Miranda S. 2005.
Mengapa Stabilitas Makro Telah Tercapai Namun Sangat Lambat Dalam Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi? Jakarta: Sidang Pleno ISEI XI.

Lipsey, Richard G, et al. 1984.

Economics, Seventh Edition. New York: Harper & Row, Publishers.

Woo, Wing Thye, Bruce Glassburner, dan Anwar Nasution. 1994.

Macroeconomic Policies, Crises, and Long-Term Growth in Indonesia, 1965-1990. Washington, D.C.: The World Bank.

Tabel Masalah dan Rekomendasi

Kebijakan	Masalah	Rekomendasi
Peningkatan investasi asing dan dalam negeri	1. Ketidakpastian (<i>uncertainty</i>)	1. Perlunya intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang menjamin lancarnya arus informasi dan terbentuknya kepastian, baik di bidang ekonomi, bisnis, sosial, keamanan, dan hukum
	2. Efek-efek negatif otonomi daerah	2. Perlunya kerja sama dan koordinasi yang rapi antara pemerintah daerah dan pusat agar kebijakan yang dikeluarkan tak saling bertentangan dan tumpang tindih. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan lembaga penegak hukum negara dan KPK dalam mengawal pelaksanaan otda
	3. Rumitnya sistem perpajakan	3. Perlu diperkenalkannya sistem perpajakan yang sederhana, prosedur yang singkat, dan interaksi antara petugas pemungut pajak dan wakil pajak yang sedikit. Perluasan basis pajak
	4. Keterbatasan infrastruktur	4. Peningkatan peran pemerintah dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur dengan berbagai insentif, seperti masa konsesi yang panjang

Daftar Singkatan

API	: Asosiasi Perminyakan Indonesia
AS	: Amerika Serikat
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BOT	: Build, Operate, and Transfer
BP Migas	: Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
Bph	: Barrel per hari
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
EORC	: Enhanced Oil Recovery Contract
FDI	: Foreign Direct Investments
G to G	: Government to Government
GDP	: Gross Domestic Product
GNP	: Gross National Product
IMF	: International Monetary Fund
ISEI	: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
JETRO	: Japan External Trade Organization
JOA	: Joint Operational Agreement
Kalla	: Mohammad Jusuf Kalla
Kepmen	: Keputusan Menteri
KKPPI	: Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

LPEM FEUI	: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Migas	: Minyak dan Gas Bumi
MNCs	: Multinational Corporations
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
OPEC	: Organization of Petroleum Exporting Countries
PECC	: Pacific Economic Cooperation Council
Perpres	: Peraturan Presiden
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

Biodata Singkat Penulis

Awan Wibowo Laksono Poesoro lahir pada tanggal 30 Juni 1974 di Jakarta, Indonesia. Penulis menyelesaikan program studi Strata 1 dengan konsentrasi Ekonomi Industri pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada bulan Februari 1997. Selanjutnya, penulis meneruskan studi Strata 2 di Los Angeles, Amerika Serikat pada *the Graduate School* di *the University of Southern California* (USC) dan meraih gelar *Master of Arts (MA) in Economics* pada bulan Mei 2001. Sekarang, penulis bekerja sebagai peneliti pada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Bisnis di *the Indonesian Institute, Center for Public Policy Research*, Jakarta, dengan fokus kajian *the economics of social issues*. Penulis juga menjadi *writing contributor* untuk harian *the Jakarta Post* dan *Investor Daily*.

